

PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN PAI BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

M. Debi Wananda, M. Ridlwan Al-Khoir, M. Hasyim Asyari, Askhabul Kirom
Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia

debivananda@gmail.com, mochridlwanalkhoir@gmail.com, Asyarih19@gmail.com, k1r0m@yudharta.ac.id

ABSTRACT:

Islamic Religious Education (PAI) plays a crucial role in shaping the character of students in Indonesia's diverse society. However, evaluation of PAI learning has so far focused primarily on cognitive aspects such as memorization and mastery of material, while aspects of attitude, tolerance, and religious moderation have not received adequate attention. This situation has resulted in the values of diversity and respect for differences not being fully internalized in the learning process. This study aims to describe and analyze the development of a multicultural-based PAI learning evaluation system from a religious moderation perspective. The study employed library research with a historical-philosophical approach and content analysis techniques. Data sources were obtained from regulations, books, and scientific journals relevant to the research theme. The study results indicate that development of PAI evaluation needs to be carried out through a reorientation of evaluation objectives, integration of multicultural values into learning materials, diversification of assessment instruments, strengthening the role of teachers, and creating an inclusive school culture. Thus, PAI evaluation measures not only knowledge but also students' attitudes and behaviors in respecting diversity and applying the values of religious moderation in daily life.

Keywords:

Learning Evaluation, Islamic Religious Education, Multiculturalism, Diverse Moderation

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan dalam pengertian yang paling mendasar adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara¹. Rumusan ini memang ideal. Tapi antara rumusan ideal dan praktik di lapangan, jarak itu masih terasa lebar. Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang tidak ada tandingannya ratusan suku, bahasa daerah, tradisi lokal, dan kelompok keagamaan hidup berdampingan dalam satu bingkai kebangsaan. Kekayaan ini nyata, tapi potensi gesekannya juga nyata. Masalahnya bukan pada kemajemukan itu sendiri, melainkan pada apakah pendidikan kita sudah cukup siap untuk mengelolanya. Dan kalau melihat realitasnya, jawabannya masih perlu banyak kerja.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran wajib di sekolah sebenarnya punya posisi yang sangat strategis. Ia bisa menjadi salah satu jalur utama dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi kepada generasi muda. Tapi dalam praktiknya, penyelenggaraan PAI masih sering berjalan secara top-down dan deduktif menyampaikan kebenaran agama dari atas tanpa cukup memberi ruang pada konteks kehidupan sehari-hari peserta didik². PAI lebih sering menjadi proses pengajaran daripada proses pendidikan yang sesungguhnya. Yang lebih problematis lagi adalah soal evaluasinya. Selama ini, penilaian dalam pembelajaran PAI masih sangat dominan pada ranah kognitif hafalan ayat, penguasaan materi fikih, pengetahuan sejarah Islam. Aspek sikap, bagaimana peserta didik sebenarnya bersikap terhadap perbedaan, bagaimana mereka memperlakukan teman yang berbeda keyakinan, hampir tidak pernah mendapat tempat yang serius dalam instrumen evaluasi. Ini bukan persoalan kecil. Ketika yang diukur hanya pengetahuan tentang Islam, sementara perilaku dan sikap dibiarkan tak terukur, maka pendidikan agama kehilangan dimensi terpentingnya.

M. Ainul Yaqin mengingatkan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan humanisme, serta secara bertahap mengurangi segala bentuk diskriminasi. Untuk itu, desain materi, metode, hingga sistem evaluasi perlu dibangun di atas prinsip-prinsip multikultural. Pendidikan multikultural sendiri dipahami sebagai pendidikan yang memberikan peluang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya, dan agama, serta menghendaki penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun latar belakang budayanya.³

Persoalannya, penelitian yang secara spesifik membahas sistem evaluasi PAI berbasis multikultural masih sangat terbatas. Banyak kajian yang menyentuh soal kurikulum multikultural atau pendekatan pembelajaran inklusif, tapi hampir tidak ada yang masuk lebih jauh ke pertanyaan: bagaimana evaluasinya dirancang? Instrumen apa yang dipakai? Harmi membahas model pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama, tapi pembahasan tentang instrumen evaluasi yang konkret belum menjadi fokusnya.⁴ Harto & Tastin mengangkat gagasan PAI berwawasan Islam *wasathiyah*, tapi kembali, soal sistem evaluasinya masih belum tergarap⁵. Di sinilah gap yang ingin diisi oleh tulisan ini. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sistem evaluasi pembelajaran PAI dapat dikembangkan secara berbasis multikultural dalam perspektif moderasi beragama dengan mencoba memberikan arah yang lebih konkret tentang bagaimana evaluasi itu seharusnya dirancang dan dijalankan, tidak hanya secara konseptual.

² Harto, K., & Tastin, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 1–16.

³ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 25.

⁴ Harmi, "Pengembangan Model Pembelajaran PAI Berbasis Moderasi Beragama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 33–47.

⁵ Harto, K., & Tastin, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 1–16.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama analisis. Pilihan metode ini bukan tanpa alasan persoalan yang dikaji bersifat konseptual-normatif, yaitu bagaimana sistem evaluasi pembelajaran PAI seharusnya dikembangkan berdasarkan prinsip multikultural dan moderasi beragama. Untuk pertanyaan semacam ini, kajian literatur adalah pendekatan yang paling tepat. Sumber data dibagi ke dalam dua kategori. Sumber primer mencakup regulasi pendidikan nasional terutama UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas karya-karya tokoh yang langsung membahas moderasi beragama seperti M. Quraish Shihab⁶ dan Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Misrawi, serta karya-karya pokok tentang pendidikan Islam dan multikulturalisme. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik kajian⁷.

Pendekatan yang digunakan adalah historis-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena kajian tentang evaluasi PAI berbasis multikultural tidak bisa dipahami secara utuh tanpa menelusuri perkembangan gagasan pendidikan Islam di Indonesia dan fondasi filosofis yang mendasarinya tentang hakikat manusia, keberagaman, dan keadilan sosial. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*, yaitu analisis isi yang dilakukan melalui beberapa tahapan: identifikasi dan seleksi sumber berdasarkan relevansinya dengan topik, kategorisasi data ke dalam tema-tema utama (konsep evaluasi, multikultural, moderasi beragama, dan integrasinya), lalu interpretasi dan sintesis antar sumber untuk membangun argumentasi. Proses ini tidak berhenti pada deskripsi, tapi diarahkan untuk menghasilkan sintesis yang kritis dan solutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Agama Islam: Fungsi, Harapan, dan Masalahnya

PAI bukan sekadar mata pelajaran tentang ritual dan dogma. Dalam rumusan yang lebih substansial, ia dipahami sebagai upaya terencana dan terstruktur untuk mendidik, mengarahkan, dan mempersiapkan peserta didik agar mampu meyakini, memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata⁸. Cakupannya luas: akhlak, Al-Qur'an-Hadits, fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam¹⁰.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 43.

⁷ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 112.

⁸ Abdul Halim dan Sumianti, "Pendidikan Agama Islam sebagai Proses Pembentukan Karakter dan Spiritualitas Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 22–35.

⁹ Fahmi Bahrul Ulum dkk., "Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta Didik di Era Modern," *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 89–101.

¹⁰ Abdul Halim, Helmun Jamil, dan Miswanto, "Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 45–57.

Tapi ada masalah yang sudah cukup lama mengendap. Dalam praktiknya, PAI masih sering dijalankan secara normatif dan dogmatis kebenaran agama disampaikan dari atas, sementara situasi nyata kehidupan peserta didik nyaris tidak masuk ke dalam ruang kelas. Harto & Tastin (2019) mengkritik kondisi ini dengan cukup tajam: PAI lebih berjalan sebagai proses pengajaran daripada proses pendidikan, lebih mirip "pendidikan perbankan" yang mengisi peserta didik dengan konten daripada mengajak mereka berpikir dan merespons masalah secara kreatif¹¹. Halim & Amril (2022) juga mencatat bahwa kurikulum PAI masih terjebak dalam tarik-menarik antara kelompok reformis dan modernis yang belum menemukan keseimbangan dalam implementasinya. Dan yang paling tidak mendapat perhatian selama ini justru sistemnya yang paling krusial: evaluasi. Kalau yang diukur hanya hafalan dan pengetahuan kognitif, sementara bagaimana peserta didik bersikap, menghargai, dan berperilaku di tengah keberagaman tidak masuk dalam penilaian maka PAI secara struktural gagal mengukur hal-hal yang paling penting¹².

B. Multikulturalisme dalam Konteks Pendidikan Indonesia

Kata "multikultural" sudah sering disebut, tapi maknanya tidak selalu dipahami secara tepat. Secara sederhana, multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui, menghargai, dan mengelola keberagaman budaya sebagai sesuatu yang niscaya bukan ancaman, bukan masalah yang harus diseragamkan¹³. Ia berbeda dari monokulturalisme yang mendorong keseragaman, dan berbeda pula dari asimilasi yang ingin meleburkan perbedaan menjadi satu identitas tunggal. Multikulturalisme normatif lebih jauh lagi menjadikan keberagaman sebagai dasar moral kehidupan bersama¹⁴. Tapi penting untuk ditegaskan bahwa multikulturalisme bukan relativisme moral. Ia bukan berarti semua nilai budaya sama benarnya dan tidak ada yang boleh dikritisi. Pendidikan multikultural justru mengandung dimensi kritis mendorong kesadaran terhadap ketidakadilan yang lahir dari diskriminasi, bukan sekadar merayakan perbedaan.

Bagi Indonesia, relevansi semua ini bukan persoalan teoritis. M. Ainul Yaqin (2005) menyatakan bahwa melalui pendidikan multikultural, generasi mendatang diharapkan menjadi generasi yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan humanisme. Tapi untuk sampai ke sana, perlu ada perubahan nyata pada desain materi, metode, dan terutama pada sistem evaluasi yang digunakan di sekolah. Selama evaluasi tidak menyentuh nilai-nilai ini, selama itu pula multikulturalisme hanya akan hidup di atas kertas¹⁵.

¹¹ Harto, K., & Tastin, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 1–16.

¹² Abdul Halim dan Amril, "Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Pembelajaran Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 115–128.

¹³ Abdul Halim, Helmun Jamil, dan Miswanto, "Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 45–57.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 25.

C. Moderasi Beragama: Bukan Jalan Tengah yang Setengah-setengah

Moderasi beragama sering disalahpahami sebagai sikap yang "tidak terlalu serius" dalam beragama, atau seolah-olah merupakan kompromi antara keyakinan dan tekanan sosial. Ini keliru. Dalam tradisi Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyah* yang artinya bukan sekadar tengah-tengah, melainkan adil, seimbang, dan teguh¹⁶. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasathiyah* adalah sikap adil dan seimbang dalam memahami serta menjalankan ajaran agama bukan lemah, bukan plin-plan, tapi justru matang secara keagamaan¹⁷. Yusuf Al-Qardhawi menambahkan bahwa konsep ini berkaitan erat dengan tiga nilai yang saling menopang: keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan keteguhan (*istiqamah*).¹⁸ Jadi orang yang moderat bukan orang yang tidak punya pendirian ia justru punya pendirian yang kuat, tapi tidak menjadikannya alasan untuk menyingkirkan yang berbeda. Abdurrahman Wahid bahkan menegaskan bahwa moderasi beragama pada akhirnya harus berujung pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum¹⁹. Sehingga dimensinya tidak berhenti pada wilayah pribadi-spiritual, tapi menyentuh ruang publik.

Dari sini mulai terlihat di mana multikulturalisme dan moderasi beragama bertemu. Keduanya menolak eksklusivisme. Keduanya mendorong penghargaan terhadap "yang lain". Bedanya, multikulturalisme datang dari tradisi sosial-budaya, sementara moderasi beragama datang dari tradisi teologis. Dalam konteks evaluasi pembelajaran PAI, perpaduan keduanya justru memberi landasan yang lebih kuat penilaian tidak hanya mempertimbangkan dimensi sosial-budaya semata, tapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman yang otentik.

D. Pengembangan Sistem Evaluasi PAI: Ke Arah yang Lebih Konkret

Bagian ini adalah inti dari keseluruhan kajian dan juga titik yang selama ini paling lemah dalam banyak tulisan tentang PAI multikultural. Banyak kajian sudah berhasil meyakinkan bahwa evaluasi PAI perlu diubah, tapi berhenti di situ, tanpa menjelaskan diubah ke arah mana dan bagaimana caranya. Tulisan ini mencoba melangkah lebih jauh dari itu.

1. Reorientasi tujuan evaluasi.

Yang paling mendasar adalah soal tujuan. Evaluasi PAI konvensional sebagian besar masih berfokus pada kemampuan kognitif seberapa banyak yang peserta didik ketahui. Padahal, kalau mengacu pada tujuan PAI itu sendiri, yang ingin dibentuk bukan hanya peserta didik yang tahu tentang Islam, tapi peserta didik yang hidup secara Islami di tengah masyarakat yang beragam. Ini artinya evaluasi harus mencakup tiga dimensi secara seimbang: kognitif, afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (perilaku nyata). Harmi (2022) menegaskan bahwa pengembangan sistem

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 43.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 112.

¹⁹ Ibid

evaluasi PAI perlu menilai tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan toleransi dan moderasi²⁰.

2. Materi yang dievaluasi perlu diperbarui.

Dalam PAI, sebetulnya banyak elemen yang sudah secara alami mendukung nilai-nilai multikultural tinggal dieksplisitkan dalam proses penilaian. Pada materi Al-Qur'an misalnya, evaluasi tidak harus berhenti di kemampuan membaca dan menghafal, tapi bisa mencakup pemahaman terhadap ayat-ayat tentang toleransi dan hidup berdampingan. Pada materi fikih, penilaian bisa lebih diarahkan ke pemahaman hubungan sosial antarmanusia (*muamalah*), bukan hanya ibadah ritual. Pada materi akhlak, evaluasi mengukur internalisasi nilai kejujuran, empati, dan sikap menghargai yang berbeda. Dan pada materi SKI, peserta didik bisa dievaluasi dari kemampuannya mengambil pelajaran dari masyarakat Madinah masa Nabi SAW sebagai contoh hidup multikultural yang nyata dalam sejarah Islam.

3. Instrumen penilaian perlu diperluas.

Ketergantungan pada tes tertulis adalah salah satu kelemahan paling nyata dalam evaluasi PAI saat ini. Untuk menilai nilai-nilai toleransi dan moderasi, dibutuhkan instrumen yang lebih beragam: observasi sikap selama proses pembelajaran, penilaian diri di mana peserta didik merefleksikan perilakunya sendiri, penilaian antarteman, portofolio yang mendokumentasikan perkembangan sikap secara berkelanjutan, hingga diskusi kelompok berbasis studi kasus. Kombinasi instrumen ini tidak bisa sekaligus menghasilkan gambaran yang lebih jujur tentang perkembangan karakter peserta didik.

4. Guru sebagai titik kritis.

Semua perubahan sistem evaluasi ini tidak akan berjalan tanpa guru yang paham spiritnya. Guru PAI dituntut tidak hanya menguasai teknik penilaian, tapi memiliki kesadaran nyata terhadap nilai-nilai multikultural dan moderasi. Ia harus bersikap adil kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka, sekaligus menjadi teladan dalam sikap moderat²¹. Abdul Halim (2023) mengingatkan bahwa guru bukan hanya *transfer of knowledge*, tapi juga *transfer of values* dan agen pembentukan karakter²². Kalau gurunya sendiri belum menghayati nilai-nilai ini, sistem evaluasi sehebat apapun tidak akan banyak gunanya.

²⁰ Harmi, "Pengembangan Model Pembelajaran PAI Berbasis Moderasi Beragama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 33–47.

²¹ Ibid

²² Abdul Halim, Helmun Jamil, dan Miswanto, "Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 45–57.

5. Lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem evaluasi.

Terakhir, evaluasi tidak hanya terjadi di ruang kelas dalam bentuk tes formal. Budaya sekolah secara keseluruhan adalah konteks di mana nilai-nilai moderasi dan toleransi itu diuji setiap hari. Sekolah yang menciptakan program kegiatan inklusif, yang menyelesaikan konflik secara dialogis, dan yang secara sadar membangun budaya toleransi itu semua adalah bagian dari ekosistem evaluasi yang lebih luas. Tanpa ekosistem ini, evaluasi formal terhadap sikap peserta didik akan kehilangan konteksnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Pertama, kelemahan utama evaluasi PAI saat ini bukan soal teknis semata, melainkan soal orientasi. Selama evaluasi hanya mengukur pengetahuan kognitif, sementara dimensi sikap dan perilaku dalam konteks keberagaman dibiarkan tidak terukur, maka PAI secara struktural gagal menjalankan fungsi terpentingnya. Kedua, multikulturalisme dan moderasi beragama meski berasal dari tradisi yang berbeda dapat diintegrasikan secara kohesif sebagai landasan pengembangan sistem evaluasi PAI. Keduanya bertemu pada satu titik: penolakan terhadap eksklusivisme dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari nilai keislaman yang otentik. Ketiga, pengembangan sistem evaluasi ini bukan hanya soal menambah instrumen baru. Ia menyangkut reorientasi tujuan, pembaruan materi yang dievaluasi, diversifikasi instrumen penilaian, penguatan kapasitas guru, dan pembangunan ekosistem sekolah yang mendukung. Semuanya perlu bergerak bersama.

Implikasinya cukup jelas. Bagi guru PAI, kajian ini mendorong refleksi atas instrumen penilaian yang selama ini digunakan dan pengembangan ke arah yang lebih inklusif. Bagi sekolah dan madrasah, ini adalah argumen untuk membangun budaya penilaian yang secara sadar menghargai keberagaman. Dan bagi pengambil kebijakan, ada urgensi untuk mengintegrasikan indikator moderasi beragama secara eksplisit ke dalam standar penilaian PAI nasional. Penelitian selanjutnya perlu bergerak lebih jauh ke arah yang lebih empiris dan aplikatif: mengembangkan instrumen evaluasi yang konkret, terukur, dan telah melalui uji validitas-reliabilitas, sehingga gagasan ini tidak hanya berhenti di level konseptual.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abdul Halim, & Amril. (2022). Problematika kurikulum pendidikan agama Islam dalam dinamika pembelajaran kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 115–128.
- Abdul Halim, Helmun Jamil, & Miswanto. (2023). Ruang lingkup pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 45–57.
- Abdul Halim, & Sumianti. (2024). Pendidikan agama Islam sebagai proses pembentukan karakter dan

- spiritualitas peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 10(1), 22–35.
- Fahmi Bahrul Ulum, et al. (2023). Implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun karakter peserta didik di era modern. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 7(2), 89–101.
- Harmi. (2022). Pengembangan model pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 33–47.
- Harto, K., & Tastin. (2019). Pengembangan pembelajaran PAI berwawasan Islam wasathiyah: Upaya membangun sikap moderasi beragama peserta didik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(1), 1–16.
- Mania, S. (2010). Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, 13(1), 78–91.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, keumatan, dan kebangsaan*. Kompas.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Pilar Media.